

Strategi Penguatan Kelembagaan Bumdes Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoagung

Rigel Nurul Fathah¹, Teti Anggita Safitri², Erni Saharudin³
Avininda Dewi Nindiasari⁴

Program Studi Akuntansi^{1,4}, Program Studi Manajemen²

Program Studi Administrasi Publik³

Universitas Aisyiyah Yogyakarta

e-mail: rigelnurul@unisayogya.ac.id

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan strategi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sidoagung, Godean, Sleman, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang pengabdian ini adalah tantangan yang dihadapi desa, seperti belum adanya BUMDes, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendampingan yang terstruktur, mencakup *workshop* pemetaan potensi dan pemilihan usaha, pelatihan penguatan kelembagaan dan tata kelola, pendampingan penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta pelatihan inovasi produk dan pemasaran. Temuan awal menunjukkan bahwa BUMDes saat ini memiliki jaringan kemitraan yang minim, yang sebagian besar terbatas pada tingkat kecamatan. BUMDes juga perlu memperluas kolaborasinya dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti dinas terkait, perbankan, dan sektor swasta, untuk memperkuat posisinya dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Berdasarkan pemetaan potensi, tiga jenis usaha telah dipilih: peternakan kambing, *catering*, dan persewaan lapangan. Hasil ini menekankan perlunya pendampingan yang terstruktur untuk memformalkan BUMDes dan meningkatkan kapasitas manajerialnya.

Kata Kunci: BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, Sidoagung, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan.

Abstract

This study aims to develop a strategic plan for the establishment of a Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Sidoagung Village, Godean, Sleman, to improve community welfare. The research addresses the challenges faced by the village, such as the absence of a BUMDes, limited human resource capacity, and a lack of community participation in economic development. The method involves a series of assistance programs, including a workshop on potential mapping and business selection, training on institutional strengthening and governance, assistance in preparing the Articles of Association/Bylaws (AD/ART), and training on product innovation and marketing. The preliminary findings indicate that the BUMDes currently has minimal partnership networks, primarily limited to the sub-district level. It has also been identified that the BUMDes needs to expand its collaboration with various stakeholders, such as related government agencies, banks, and the private sector, to strengthen its position and accelerate business growth. Based on potential mapping, three business types were chosen:

goat farming, catering, and field rental. These results highlight the need for structured assistance to formalize the BUMDes and enhance its managerial capacity.

Keywords: *BUMDes, Village-Owned Enterprise, Sidoagung, community empowerment, institutional strengthening.*

PENDAHULUAN

Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, namun belum sepenuhnya terkelola secara optimal. Potensi ini seharusnya dapat menjadi modal utama bagi pengembangan BUMDes. BUMDes, sebagai pilar ekonomi desa, memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015. Regulasi ini menegaskan peran BUMDes tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Program pengembangan UMKM dan BUMDes merupakan instrumen untuk menaikkan daya beli Masyarakat dan katup pengaman dari situasi krisis moneter (Fathah & Safitri, 2022).

Namun, di Desa Sidoagung, situasi yang ada menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realitas. Meskipun semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai modal sosial telah ada, BUMDes di desa ini masih berada pada tahap perumusan. Ini mengindikasikan adanya kelambanan dalam proses inisiasi dan legalitas. Akibatnya, potensi ekonomi desa belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan dan analisis, terdapat beberapa permasalahan krusial yang dihadapi oleh pihak Desa Sidoagung dalam upaya mendirikan dan mengelola BUMDes:

- a. Kelemahan dalam Pemetaan Potensi Desa Permasalahan mendasar adalah belum adanya pemetaan potensi desa yang komprehensif. Pemetaan ini bukan hanya sekedar mengidentifikasi sumber daya yang ada, melainkan juga menganalisis kelayakan ekonomi, pasar, dan keberlanjutan dari setiap potensi. Tanpa pemetaan yang mendalam, pemilihan unit usaha BUMDes berisiko tinggi untuk gagal karena tidak didasarkan pada data dan analisis yang valid. Akibatnya, alokasi sumber daya desa bisa menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan BUMDes membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi manajerial, akuntansi, dan pemasaran yang memadai. Permasalahan di Desa Sidoagung adalah keterbatasan SDM yang berkualitas dan berpengalaman di bidang tersebut. Pengelola BUMDes seringkali belum memiliki pemahaman yang kuat tentang tata kelola perusahaan, manajemen keuangan, serta strategi bisnis. Keterbatasan ini menghambat BUMDes untuk beroperasi secara profesional, akuntabel, dan transparan, yang seringkali menjadi

penyebab kegagalan BUMDes di banyak tempat. Masalah pengelolaan keuangan oleh SDM merupakan masalah yang sering ditemui di UMKM maupun Bumdes walaupun SDM sudah menempuh Pendidikan formal, namun tidak semua memiliki latar belakang akuntansi (Fathah & Widyaningtyas, 2020).

- c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan BUMDes. Minimnya keterlibatan masyarakat juga menjadi hambatan dalam pengelolaan BUMDes (Silmi & Nindiasari, 2023). BUMDes yang kuat adalah BUMDes yang dibangun dan dikelola dengan dukungan penuh dari masyarakat. Di Desa Sidoagung, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengembangan BUMDes masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, komunikasi yang tidak efektif, atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap potensi BUMDes. Akibatnya, BUMDes tidak dapat berfungsi optimal sebagai wadah ekonomi kolektif dan pemberdayaan.
- d. Kurangnya Penataan Kelembagaan dan Legalitas Aspek legalitas, seperti penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), merupakan fondasi yang wajib dimiliki oleh BUMDes. Namun, BUMDes di Desa Sidoagung masih dalam tahap perumusan, yang berarti landasan hukumnya belum kuat. Status hukum BUMDes baru diakui apabila didukung oleh Peraturan Desa (Perdes), AD/ART, serta pencatatan resmi di Kementerian Desa (Purwaningsih, Mediawati, dan Mursyidah (2022). Tanpa dokumen tersebut, BUMDes tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas. Tanpa AD/ART yang jelas, BUMDes tidak memiliki aturan main yang mengikat, struktur organisasi yang definitif, dan mekanisme pengambilan keputusan yang transparan. Hal ini rentan menimbulkan konflik internal dan ketidakjelasan dalam operasional.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan intervensi yang terstruktur dan terpadu. Pendampingan dari akademisi yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, dan administrasi publik adalah solusi yang relevan. Berikut adalah analisis solusi yang diusulkan:

- a. Pendampingan Pemetaan Potensi dan Studi Kelayakan Usaha Tim akademisi dapat memfasilitasi *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melakukan pemetaan potensi secara sistematis. Pendekatan ini akan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, tim dapat mengajarkan metode analisis kelayakan usaha, seperti analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), untuk membantu desa memilih unit usaha yang paling prospektif dan berkelanjutan. Pendampingan ini akan menghasilkan rekomendasi unit usaha yang memiliki potensi pasar dan dampak ekonomi yang nyata bagi desa.
- b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dan Manajerial Untuk mengatasi keterbatasan SDM, tim akademisi dapat menyelenggarakan pelatihan

yang berfokus pada peningkatan kemampuan manajerial. Pelatihan ini mencakup materi-materi praktis seperti:

- Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*): Membahas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Menurut Ramadhia dan Fathah (2024), pencapaian kinerja keuangan desa melalui pendekatan *value for money* tidak hanya mengukur aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola.
- Manajemen Keuangan Dasar: Mengajarkan cara penyusunan laporan keuangan sederhana, pembukuan, dan pengelolaan arus kas.
- Strategi Pemasaran: Memberikan pengetahuan tentang pemasaran produk, termasuk penggunaan media digital, untuk memperluas jangkauan pasar. Safitri et al. (2023) menegaskan bahwa pelatihan kewirausahaan perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan pemasaran, terutama melalui media digital, agar pelaku usaha mampu memperluas jangkauan pasarnya secara lebih efektif dan kompetitif.

Pelatihan ini tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada praktik, dengan menggunakan studi kasus yang relevan dengan kondisi desa.

- c. Fasilitasi Penyusunan AD/ART dan Legalitas Tim akademisi dapat mendampingi pihak desa dalam proses penyusunan AD/ART. Pendampingan ini memastikan bahwa BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aspek-aspek penting yang akan difasilitasi meliputi struktur organisasi (perumusan struktur yang efektif dan efisien), hak dan kewajiban (penjelasan mengenai hak dan kewajiban pengelola dan anggota), dan mekanisme keuangan (aturan main terkait pengelolaan keuangan, pembagian keuntungan, dan audit internal). Pendampingan ini juga akan mengarah pada proses pengesahan AD/ART oleh pemerintah desa, sehingga BUMDes memiliki legalitas yang sah untuk beroperasi.
- d. Penguatan Kemitraan dan Jaringan Usaha Tim akademisi dapat membantu BUMDes dalam membangun jejaring kemitraan dengan pihak eksternal, seperti dinas terkait, perbankan (untuk akses permodalan), dan sektor swasta (untuk kerjasama bisnis). Dengan adanya jejaring yang kuat, BUMDes dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya dan memperluas pasar produk-produk desa.

Secara keseluruhan, pendekatan terpadu ini diharapkan dapat mengubah BUMDes di Desa Sidoagung dari sekadar wacana menjadi entitas usaha yang riil, profesional, dan berkelanjutan. Dengan fondasi

yang kuat, BUMDes akan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang tangguh, memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dan menjadi contoh keberhasilan bagi desa-desa lain.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini disusun dalam bentuk empat tahap utama yang saling berkesinambungan, dengan tujuan untuk mendirikan dan menguatkan BUMDes Desa Sidoagung.

Tahap 1: *Workshop* Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha BUMDes. Lathifah dkk. (2025) menegaskan bahwa kegiatan pemetaan potensi merupakan tahap awal yang sangat krusial bagi BUMDes, karena membantu desa mengidentifikasi peluang usaha yang realistis dan sesuai dengan kapasitas lokal. Tahap ini diawali dengan mengidentifikasi kemitraan strategis dengan berbagai aktor, seperti kelompok tani, koperasi desa, instansi pemerintahan, dan pihak swasta, untuk memperkuat kapasitas usaha BUMDes. Pelatihan ini dikoordinasi oleh Rigel Nurul Fathah dan Avininda Dewi Nindiasari, dosen akuntansi, yang berfokus pada analisis potensi desa melalui diskusi dan FGD.

Focus Group Discussion (FGD). Langkah-langkahnya meliputi pengarahan dari Narasumber (pemberian materi terkait peran BUMDes dan strategi pemilihan usaha yang tepat sesuai kondisi local), diskusi potensi sumber daya (diskusi mengenai potensi sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan budaya desa), analisis SWOT (peserta diajak mengisi tabel SWOT untuk memahami kondisi desa lebih baik), pemilihan kriteria usaha (narasumber memberikan kriteria pemilihan usaha yang relevan dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar), penyusunan daftar prioritas usaha (berdasarkan diskusi, disusun daftar prioritas usaha yang paling potensial), perumusan rencana pengembangan usaha (fasilitator membantu merumuskan rencana pengembangan usaha, termasuk modal dan strategi pemasaran), simulasi keberlanjutan usaha (simulasi sederhana untuk menghitung pendapatan, biaya, risiko, dan keuntungan jangka panjang), serta monitoring dan evaluasi (memastikan pengelola BUMDes menjalankan rencana usaha dengan baik).



Gambar 1. *Workshop* Pemetaan dan Pemilihan Usaha Bumdes

Tahap 2: Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDes. Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDes adalah proses penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Purnamasari, Yulyana, dan

Ramdani (2016) menekankan bahwa efektivitas BUMDes sangat dipengaruhi oleh kemampuan desa membangun kemitraan strategis serta memperluas jaringan usaha dengan berbagai pihak. Tujuan utama pelatihan ini adalah membekali pengelola BUMDes dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan operasional dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Pelatihan dilakukan oleh tim pengabdian dan dikoordinasi Erni Saharuddin S.Sos., M.AP selaku dosen Administrasi Publik. Pengabdian ini merupakan pengembangan penelitian dan pengabdian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu tentang penataan kelembagaan Ranting Aisyiyah. Langkah-langkah pelatihan yaitu Sesi Pengenalan Tata Kelola: Menjelaskan konsep dasar, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan.

- 1) Analisis Kebutuhan Kelembagaan: Mengevaluasi kondisi kelembagaan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam struktur, regulasi internal, dan manajemen keuangan. Kolaborasi antar aktor desa dalam perencanaan dan anggaran serta pelaporan realisasi anggaran menunjukkan bentuk governance publik yang sistematis dan transparan. (Ariani & Sulindawati, 2025)
- 2) Pelatihan Manajemen Keuangan: Memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan yang transparan, pencatatan, pelaporan, dan audit internal. Pelatihan manajemen keuangan dasar, khususnya penyusunan laporan keuangan sederhana dan pengelolaan arus kas, menjadi kebutuhan penting bagi unit usaha desa agar memiliki tata kelola yang akuntabel (Fathah & Hafni, 2023).
- 3) Simulasi dan Diskusi: Simulasi dan studi kasus untuk penyelesaian masalah internal, penyusunan anggaran, dan penanganan konflik.
- 4) Penyusunan *Action Plan*: Peserta menyusun rencana aksi untuk memperbaiki tata kelola, termasuk perubahan struktur organisasi dan penetapan SOP.
- 5) Monitoring dan Evaluasi: Memastikan peserta menerapkan apa yang dipelajari dalam pengelolaan BUMDes



Gambar 2. Pelatihan Penguatan dan Tata Kelola BUMDes

Tahap 3: Pelatihan Penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pelatihan ini merupakan langkah penting dalam membentuk dasar hukum BUMDes. Dikoordinasi oleh Rigel Nurul Fathah dan Teti Anggita Safitri, pelatihan ini mencakup tahapan penyusunan AD/ART dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).

Pelatihan ini merupakan langkah penting dalam membentuk dasar hukum dan aturan internal yang mengatur tata kelola serta operasional BUMDes. Pelatihan ini difasilitasi oleh tim pengabdian Bersama mahasiswa dan dikoordinir oleh Rigel Nurul Fathah SE., M.Ak., Akt., CA selaku dosen Akuntansi dan Teti Anggita Safitri, SE., M.Sc selaku dosen manajemen yang sebelumnya pernah Menyusun AD /ART untuk BUMDes. Berikut tahapan dalam menyusun pelatihan dan sosialisasi tersebut: 1. Tim Pengabdian menyusun Draft Penyusunan AD/ART yang mencakup poin-poin penting dalam AD/ART, seperti visi dan misi BUMDes, struktur organisasi, hak dan kewajiban pengurus, mekanisme pengambilan keputusan, dan aturan internal lainnya dengan Berikan panduan praktis bagi peserta mengenai format penulisan AD/ART dengan menekankan pentingnya aturan yang jelas dan mudah dipahami. 2. Tim Pengabdian menyusun draft Raperdes untuk menjelaskan tahapan dalam menyusun Raperdes serta prosedur legal yang perlu diikuti dalam pengesahan AD/ART melalui Raperdes. 3. Diskusi Kelompok. Peserta dibagi ke dalam kelompok untuk menyusun draft AD/ART BUMDes. Setiap kelompok dapat fokus pada bagian yang berbeda, seperti struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, atau aturan keuangan. 4. Presentasi Draft. Tim Pengabdian meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil penyusunan AD/ART mereka di depan peserta lain untuk mendapatkan masukan dan umpan balik. Prosedur Pengesahan Raperdes: Tim Pengabdian memaparkan tahapan proses mulai dari musyawarah desa, pengajuan draft ke BPD, hingga pengesahan oleh kepala desa. 6. Persiapan Sosialisasi kepada Masyarakat. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai draft AD/ART dan Raperdes. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memahami isi dokumen dan memiliki kesempatan untuk memberi masukan. 7. Persetujuan Raperdes: Setelah disepakati, Raperdes harus disetujui oleh BPD dan disahkan oleh kepala desa. Setelah itu, AD/ART resmi berlaku dan menjadi acuan legal bagi pengelolaan BUMDes. 8. Monitoring dan Evaluasi. Memastikan bahwa BUMDes menjalankan operasionalnya sesuai dengan AD/ART yang telah disahkan dan memastikan tata kelola berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis ditemukan bahwa proses penguatan BUMDes di Desa Sidoagung menghadapi tantangan signifikan terkait jejaring kemitraan dan kapasitas kelembagaan. Dari sisi kemitraan, BUMDes saat ini masih terisolasi, dengan jejaring yang hanya terbatas pada tingkat kecamatan. Keterbatasan ini menjadi penghambat utama dalam mengakses sumber daya eksternal yang vital,

seperti permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Berbeda dengan BUMDes yang sukses, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas pemerintahan terkait (seperti Dinas Koperasi dan UKM), lembaga perbankan, dan sektor swasta, merupakan kunci untuk mempercepat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Kemitraan yang kuat dapat membuka peluang pendanaan, akses pelatihan, dan eksposur pasar, yang semuanya krusial untuk meningkatkan daya saing BUMDes.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan ini, tim pengabdian telah berhasil melakukan pemetaan potensi yang menghasilkan identifikasi tiga jenis usaha yang dianggap paling prospektif: persewaan lapangan, usaha UMKM jasa *catering*, dan usaha peternakan kambing. Keputusan ini menunjukkan langkah awal yang strategis dalam memfokuskan sumber daya BUMDes pada sektor-sektor yang relevan dengan potensi lokal Desa Sidoagung. Pemilihan usaha ini mengindikasikan adanya studi kelayakan awal yang meski tidak dijelaskan secara rinci dalam laporan, namun menjadi landasan untuk rencana tindak lanjut.

Selanjutnya, laporan juga menyoroti pentingnya aspek legalitas dan tata kelola melalui pelatihan penyusunan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Proses ini dimulai dengan koordinasi antara tim pengabdian, Kepala Desa, dan perangkat desa. Penyusunan AD/ART menjadi fondasi legal yang memastikan BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat, struktur organisasi yang jelas, serta mekanisme tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tanpa landasan ini, BUMDes berisiko mengalami masalah internal, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakjelasan pembagian keuntungan. Oleh karena itu, inisiatif ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan iklim bisnis yang sehat. Dalam penelitiannya, Fathah (2025) menunjukkan bahwa tata kelola organisasi di tingkat desa hanya dapat berfungsi optimal apabila prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan secara konsisten terutama transparansi, akuntabilitas, serta penguatan mekanisme kontrol internal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Sidoagung menghadapi tantangan signifikan dalam hal pendirian, tata kelola kelembagaan, dan pengembangan usaha. Pendampingan yang terstruktur melalui serangkaian pelatihan dan *workshop* merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Tiga jenis usaha potensial telah diidentifikasi dan rencana strategis telah disusun, yang menjadi landasan kuat untuk pengembangan BUMDes yang profesional dan berkelanjutan di masa depan. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memberikan manfaat signifikan bagi warga Desa Sidoagung, Kecamatan Godean. Melalui pemberdayaan potensi lokal, BUMDes memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, mengungkit kesejahteraan, serta berkontribusi pada pembangunan desa secara langsung.

Keberadaan BUMDes juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.

Meskipun operasional BUMDes dikatakan berjalan dengan baik, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada. Hambatan utama yang sering dihadapi adalah minimnya peran serta dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai sebuah lembaga usaha yang juga mengemban misi pemberdayaan, BUMDes memerlukan kemampuan manajerial yang andal. Hal ini masih menjadi tantangan bagi BUMDes di Desa Sidoagung.

Dengan demikian, selain harus mengatasi masalah pengelolaan, BUMDes juga harus terus mempertahankan kontribusinya sesuai dengan fungsi utamanya. Perkembangan dan kemajuan zaman juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BUMDes dalam menjalankan perannya sebagai lembaga usaha di desa.

Berdasarkan hal tersebut, saran yang dapat diberikan adalah optimalisasi peran SDM yang berkualitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme BUMDes, sehingga dapat menjadi lembaga usaha yang lebih produktif, kreatif, inovatif, adaptif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Fathah, R. N., & Safitri, T. A. (2020). Pelatihan pelaporan keuangan sederhana dan manajemen keuangan bagi UMKM yang terdaftar di Bank Wakaf Mikro UNISANA. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 73-77.
- Silmi, S. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Amarta Kelurahan Pandowoharjo tahun 2016-2021. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8).
- Fathah, R. N., & Widyaningtyas, R. D. (2020). *Pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar UNISA*. The 11th University Research Colloquium, 55-58. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., & Mursyidah, L. (2022). *Legal position of village-owned enterprises as legal entities in Indonesian legislation*. *Procedia of Sciences and Humanities: Proceedings of the 1st SENARA 2022*
- Ramadhia, N. F., & Fathah, R. N. (2024). Management Financial Performance Village Fund Allocation Based On Value For Money in Wukirsari Kapanewon Village Imogiri Bantul District. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 8(1), 122-128.
- Safitri, T. A., Fathah, R. N., Nugraheni, I. A., & Putriana, D. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Dan Marketing Online Di Panti Asuhan Aisyiyah. *Community Development Journal*, 4(2), 1536-40
- Lathifah, D., Maharani, N. A., Maharani, R. B., Widyaningsih, A., & Nurriszkiana, R. (2025). *Pemetaan potensi usaha BUMDes di Desa Kayuambon, Lembang*. *Abdimas Universal*, 7(2), 496-502.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). Efektivitas pengelolaan

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2).

Ariani, N. L. N., & Sulindawati, N. L. G. E. (2025). *Analisis praktik public governance development dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran desa di Desa Ambengan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-12.

Fathah, R. N., & Hafni, D. A. (2023). *Pelatihan pelaporan keuangan pada kelompok UMKM Giri Sembada Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 2325-2333. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.14439>

Fathah, R. N. (2025). Implementasi Good Corporate Governance dalam Mengoptimalkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 15(1)